

Abstrak

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum mengatakan bahwa hukum dan penegakkan hukum merupakan sebagian dari faktor penegakkan hukum yang tidak bisadiabaikan jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan.¹ Di Kabupaten Blora Penyalahgunaan Narkotika meningkat dari tahun ke tahun meskipun sudah ada penegakkan hukum yang tegas. Meskipun peran Jaksa yang sudah melakukan eksekusi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan baik akan tetapi masih terdapatnya kendala-kendala dalam proses eksekusi sehingga kurang dapat memaksimalkan peran jaksa. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah peran jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Bagaimanakah hambatan terhadap eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Bla sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 272 dan 273 KUHAP. Kemudian pada Pasal 278 Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan pidana pengadilan/eksekusi. Hambatan terhadap eksekusi putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu untuk eksekusi yang harus dilaksanakan rehabilitasi. Sarana prasarana tidak ada, sedangkan rehabilitasi harus di tempat dimana rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah.² Kemudian dalam kasus pidana anak, itu harus dipekerjakan di suatu tempat (dimasukkan ke Lembaga sosial di sini tidak ada). Secara tehnis kemudian, salinan putusan yang diberikan pengadilan terlampau lama sampai di kejaksaan dan jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi apabila salinan putusan tersebut belum disampaikan ke kejaksaan.

Kata kunci : Eksekusi, Jaksa, Narkotika

¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5

² Wawancara dengan Bapak Bambang Widiyanto, S.H. Jabatan: KASI Barang Bukti dan Barang Rampasan pada 10 Juni 2021

Abstract

*According to Soerjono Soekanto in his book *Factors Affecting Law Enforcement* said that law and law enforcement are part of law enforcement factors that cannot be ignored if ignored will cause the expected law enforcement to not be achieved. In Blora District, drug abuse has increased from year to year, even though there has been strict law enforcement. Although the role of the Prosecutor has carried out the execution of criminal acts of narcotics abuse well, there are still obstacles in the execution process so that it is not able to maximize the role of the prosecutor. The formulation of the problem in this study is 1) What is the role of the prosecutor in the execution of the judge's decision on the crime of narcotics abuse? What are the obstacles to the execution of the judge's decision on the crime of narcotics abuse? The type of research used is juridical-empirical with a statutory and case approach. The results of his research show that in the Decision Case Number 2/Pid.Sus/2021/PN Bla, in accordance with the applicable regulations, the Prosecutor can execute the decision in accordance with the provisions of Article 270 in conjunction with Articles 272 and 273 of the Criminal Procedure Code. Then in Article 278 the Prosecutor sends a copy of the official report on the implementation of the court decision signed by him, the head of the correctional institution and the convicted person to the court that decides the case at the first level and the clerk records it in the register of supervision and observation. Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number PER-036/A/JA/09/2011 concerning Operational Standards (SOP) for Handling General Crime Cases, specifically in Article 48 determines the implementation of court criminal decisions/executions. Barriers to the execution of the judge's decision on the crime of narcotics abuse, namely for executions that must be carried out rehabilitation. There is no infrastructure, while rehabilitation must be in a place where the hospital is designated by the government. Then in the case of a child criminal, it must be employed somewhere (inserted into Social Institutions here there is no). Technically then, a copy of the decision given by the court took too long to reach the prosecutor's office and the prosecutor did not have the authority to carry out the execution if the copy of the decision had not been submitted to the prosecutor's office.*

Keyword : Execution, Prosecutor, Narcotics